

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang menganut sistem otonomi daerah sejak tahun 1999. Dimana telah tertuang pada UU No. 22 Tahun 1999, yang berisi tentang hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai peraturan dan perundang – undangan. Kemudian, telah dilakukan revisi menjadi UU No. 32 Tahun 2004. Dalam revisian tersebut dijelaskan bahwa pemerintah daerah memisahkan fungsi eksekutif dan fungsi legislative. Berdasarkan fungsinya, Pemerintah Daerah (Eksekutif) dengan Dewan Perwakilan Rakyat (Legislatif) terjadi hubungan keagenan (Halim, 2001; Halim dan Abdullah, 2006).

Semua wewenang tentang sistem ekonomi yang dilimpahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, semata – mata untuk memberi kebebasan kepada pemerintah daerah dalam mengoptimalkan sistem pemerintahan daerahnya masing – masing. Tidak terkecuali pada pemerintahan Propinsi Jawa Barat, setiap Kabupaten/Kota di propinsi Jawa Barat diberikan wewenang untuk menjalankan sistem otonomi. Setiap Kab/Kota di Propinsi Jawa Barat berlomba – lomba dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang tidak lain tujuannya untuk meningkatkan

kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Dalam pelaksanaannya, tentu pemerintah daerah setiap Kab/Kota memanfaatkan pembiayaan dari APBD.

Tabel 1.1
Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Propinsi Jawa Barat
(%)

Tahun	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
LPE	4,77	5,60	6,02	6,48	6,21	4,19	6,20	6,48	6,21	6,06	5,50

Sumber : *Jawa Barat Dalam Angka*, Berbagai Tahun.

Berbicara tentang sistem otonomi daerah, sangat erat kaitannya dengan peraturan pendanaan atau keuangan yang telah di limpahkan kepada setiap pemerintah daerahnya masing-masing. Tabel diatas menunjukkan data LPE Propinsi Jawa Barat, terjadi peningkatan dari tahun 2004 sampai 2008, namun pada tahun 2009 terjadi penurunan yang sangat signifikan. Hal tersebut salah satunya dipengaruhi oleh keuangan daerah seperti pendapatan daerah dan belanja daerah. Menurut Basukianto (2008), dalam upaya untuk menjaga tingkat pertumbuhan yang efisien diperlukan adanya campur tangan pemerintah. Maka LPE ini lah yang menjadi patokan pemerintah daerah dalam pembangunan ekonomi. Karena pertumbuhan ekonomi merupakan simbol dari maju atau tidaknya pembangunan ekonomi pada suatu daerah. Menurut Sukirno, (1994), bahwa Pertumbuhan Ekonomi merupakan perkembangan kegiatan perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah sehingga akan meningkatkan kemakmuran masyarakat. **Pada tahun 2014 mengalami keterlambatan pertumbuhan**

ekonomi sebesar 0,56%. Hal ini disebabkan karena adanya masalah impor dan ekspor. Tingkat impor semakin tinggi sedangkan ekspor semakin rendah. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah dan BI untuk mengatasi kondisi defisit neraca berjalan akibat besarnya impor untuk memenuhi kebutuhan domestik dengan maksud untuk menjaga stabilitas kondisi makroekonomi dibandingkan mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Anggaran daerah di Indonesia biasanya terbagi menjadi dua, Anggaran Pendapatan dan Anggaran Belanja Daerah atau disebut APBD. Menurut PP No. 58 Tahun 2005, APBD merupakan Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD. Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah harus dicatat dalam anggaran APBD. Anggaran tersebut merupakan rencana keuangan pemerintah daerah yang akan digunakan dalam memberi pelayanan publik atau dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas desentralisasi, sedangkan tugas-tugas dekonsentrasi (tugas pembentukan) tidak dicatat di APBD. APBD dirancang dan disepakati oleh Dewan Eksekutif dan Dewan Legislatif, lalu dirapatkan dan di sah kan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Dewan Legislatif pun bertugas mengawasi Dewan Eksekutif dalam melaksanakan Perda nya.

Penerimaan pada Pendapatan Daerah yang paling berpengaruh adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD terdiri dari Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain PAD

yang sah. Dibawah ini data pertumbuhan PAD Propinsi Jawa Barat lima tahun terakhir .

Tabel 1.2.
PAD Propinsi Jawa Barat
(Triliun Rupian)

Tahun	PAD
2011	8,50
2012	7,63
2013	8,48
2014	13,03
2015*	16,26

Sumber : *Jawa Barat Dalam Angka 2015*

*angka sementara

Dari data diatas, bisa kita simpulkan bahwa penerimaan pemerintah daerah berupa PAD di Propinsi Jawa Barat lima tahun terakhir rata – rata mengalami kenaikan, walaupun pada tahun 2012 terjadi penurunan namun tidak signifikan. Dengan adanya peningkatan PAD pada APBD, maka anggaran belanja modal pemerintah daerah dapat dimaksimalkan atau dioptimalkan. Dengan demikian, pemerintah daerah diharapkan mampu mengalokasikan anggaran belanja modal pemerintah daerah dengan maksimal, untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kenaikan PAD dapat di pengaruhi oleh investasi – investasi yang masuk pada daerah tersebut. Untuk menarik investasi pemerintah perlu memfasilitasi aktivitas peningkatan perekonomian, salah satunya dengan membangun infrastruktur dan memberi fasilitas kemudahan dalam berinvestasi.

Mengenai pembangunan fasilitas – fasilitas daerah, pemerintah menggunakan sumber dana dari Anggaran Belanja Modal. Alokasi Belanja Modal Pemerintah Daerah sangatlah penting dalam proses pembangunan suatu daerah. Seperti pernyataan Darwanto dan Yustikasari (2007), bahwa pemanfaatan anggaran belanja seharusnya dialokasikan untuk hal-hal produktif, misalnya untuk pembangunan. Oleh sebab itu harus mengetahui variabel apa saja yang mempengaruhi Belanja Pemerintah Daerah, supaya pemerintah memiliki ukuran dalam anggaran belanja modal. Adapun variabel yang mempengaruhi alokasi anggaran belanja modal pemerintah daerah seperti PAD, DAU, DAK dan Pertumbuhan Ekonomi.

Seperti yang sudah dijelaskan diatas, bahwa tingkat Pertumbuhan Ekonomi juga sebagai tolak ukur dalam peningkatan alokasi anggaran belanja modal pemerintah daerah. Pertumbuhan ekonomi mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan ekonomi secara terus menerus, dengan tujuan meningkatkan pendapatan per kapita penduduk. Dalam melakukan pembangunan ekonomi pemerintah dapat melakukan dengan membuka lapangan pekerjaan sehingga masyarakat dapat mandiri dan sejahtera dengan pendapatan yang lebih baik. Hal tersebut akan mempengaruhi tingkat PDRB Per kapita penduduk. Dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi, pemerintah menggunakan dana yang bersumber dari alokasi anggaran belanja modal pemerintah. Semakin tinggi PAD, maka semakin besar investasi yang masuk pada Alokasi Anggaran Belanja Modal Pemerintah Daerah.

Penerimaan Pemerintah Daerah berupa Dana Perimbangan yang di transfer oleh pemerintah pusat. Dana Perimbangan terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK). Tujuan dari Dana Perimbangan ini adalah untuk mengatasi ketimpangan dalam kemampuan setiap daerah mendanai kegiatan operasional daerahnya masing-masing. Tranfer Dana yang diberikan kepada setiap daerah besarnya berbeda – beda, sesuai kebutuhan dana operasional daerahnya masing – masing. DAU dan DAK bersumber dari APBN. DAU dan DAK berpengaruh dalam Alokasi Belanja Modal. Peningkatan pada DAU, akan meningkatkan juga pada Alokasi Belanja Modal, dan sebaliknya jika terjadi pengurangan pada transfer dana perimbangan, akan menurunkan Alokasi Belanja Modal, Legrenzi dan Milas, (2001) dan Abdul dan Halim, (2004). Sedangkan DAK, bertujuan untuk pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana prasarana dengan umur ekonomis yang panjang. jika pemerintah daerah menggunakan DAK dengan tepat dan baik, maka akan mempengaruhi Alokasi Belanja Modal. Karena DAK cenderung akan menambah asset tetap pemerintah daerah guna untuk meningkatkan kualitas pelayan publik.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Dini Arwati dan Novita Hadiati, (2013). Variabel yang digunakan dalam penelitian ini sama dengan variabel yang digunakan oleh Dini Arwati dan Novita Hadiati, (2013), yang berjudul “ Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal pada Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Barat Tahun 2008 – 2010. Namun pada penelitian ini, penulis menambahkan satu variabel independen berupa Dana Alokasi Khusus (DAK). Karena menurut penelitian yang dilakukan oleh Pungky Ardhani, (2013), yang berjudul “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah)”, bahwa variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif terhadap belanja modal.

1.2. Rumusan Masalah

Telah banyak dilaksanakannya penelitian tentang Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, DAU, DAK, PAD terhadap Belanja Modal Pemerintah. Salah satunya, penelitian yang dilakukan oleh Dini Arwati dan Novita Hadiati (2013), dengan study kasus Propinsi Jawa Barat Tahun 2008 – 2010. Pada penelitian tersebut, mereka berhasil membuktikan bahwa Pertumbuhan Ekonomi, DAU, PAD berpengaruh positif terhadap Belanja Modal Pemerintah. Dengan pemaparan latar belakang, penulis ingin mencoba dalam penelitian ini dengan menambahkan variabel bebas berupa Dana Alokasi Khusus dan dengan tahun penelitian yang berbeda. Adapun permasalahan yang ditemui penulis adalah :

- a. Apakah Pertumbuhan Ekonomi, DAU, DAK, dan PAD berpengaruh positif secara simultan terhadap Alokasi Belanja Modal Kabupaten/kota di Propinsi Jawa Barat Tahun 2014?
- b. Apakah Pertumbuhan Ekonomi, DAU, DAK, dan PAD berpengaruh positif secara parsial terhadap Alokasi Belanja Modal Kabupaten/kota di Propinsi Jawa Barat Tahun 2014?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

- a. Menganalisis pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, DAU, DAK, PAD secara simultan terhadap Alokasi Belanja Modal Kabupaten/kota di Propinsi Jawa Barat Tahun 2014.
- b. Menganalisis pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, DAU, DAK, dan PAD secara parsial terhadap Alokasi Belanja Modal Kabupaten/kota di Propinsi Jawa Barat Tahun 2014.

1.4. Manfaat Penelitian

Penulis sangat berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antar lain :

- a. Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan pandangan dan wawasan tentang pengalokasian Belanja Modal Pemerintah.

- b. Sebagai bahan referensi dan data tambahan bagi peneliti lainnya yang tertarik pada kajian ini.

1.5. Batasan Masalah

Agar penulisan skripsi ini tidak menyimpang dan mengambang dari tujuan yang semula direncanakan sehingga mempermudah mendapatkan data dan informasi yang diperlukan, maka penulis menetapkan batasan-batasan sebagai berikut :

1. Pengaruh variabel independen seperti Pertumbuhan ekonomi (PDRB), PAD, DAU, dan DAK terhadap variabel dependen yaitu Alokasi Belanja Modal Pemerintah
2. Sumber yang digunakan dalam penelitian ini adalah Badan Pusat Statistika Jawa Barat dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK).

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi pemaparan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah yang diteliti, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA dan LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tentang pemaparan mengenai landasan teori yang digunakan sebagai dasar acuan penelitian, penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian, kerangka pemikiran penelitian, dan hipotesis penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang :

a. Jenis dan Cara Pengumpulan Data

Menguraikan jenis-jenis data yang diperlukan. Untuk penelitian yang digunakan data primer dijelaskan metode pengambilan data. Sedangkan untuk data sekunder dijelaskan sumberdatanya.

b. Definisi Operasional Variabel

Menguraikan tentang variabel-variabel yang digunakan agar bisa operasional di dalam penelitian.

c. Metode Analisis yang digunakan dalam Penelitian.

BAB IV HASIL DAN ANALISIS

Bab ini berisi pemaparan mengenai deskripsi objek penelitian, analisis data, dan interpretasi hasil.

BAB VI SIMPULAN dan IMPLIKASI

Bagian ini berisikan tentang simpulan-simpulan yang langsung diturunkan dari diskusi dan analisis yang dilakukan pada bagian sebelumnya.

Simpulan ini juga harus telah menjawab pertanyaan-pertanyaan pada rumusan masalah. Sedangkan bagian implikasi, muncul sebagai hasil dari simpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah, sehingga dari sini dapat ditarik benang merah apa implikasi teoritis penelitian ini.

BAGIAN AKHIR

Bagian akhir dari skripsi penelitian ini terdiri dari dua hal :

1. Daftar Pustaka
2. Lampiran

Lampiran dipakai untuk menempatkan data atau keterangan lain yang berfungsi untuk melengkapi uraian yang telah disajikan dalam bagian inti.